

Nama : Amaradina Fatia Sari

NPM : 2523031004

CASE STUDY PERTEMUAN 12

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.

Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

- 1. Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!**

JAWAB :

Rendahnya partisipasi politik generasi muda dalam kasus tersebut secara langsung berhubungan dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS, karena:

1. Metode hapalan tidak membuat siswa paham atau peduli politik.
2. Kurangnya isu aktual membuat siswa tidak melihat relevansi pemilu.
3. Minimnya literasi politik membuat mereka apatis dan rentan manipulasi.
4. Tidak adanya praktik demokrasi membuat mereka tidak siap menjadi warga negara aktif.

5. Nilai-nilai kewarganegaraan tidak tertanam, sehingga tanggung jawab politik rendah.
6. Tidak ada pembelajaran reflektif tentang politik uang, membuat mereka tidak kritis.

Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan/IPS yang tidak kontekstual berkontribusi kuat pada munculnya generasi muda yang pasif, apatis, dan tidak berdaya dalam proses demokrasi.

2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pembiaran praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!

JAWAB :

1. Demokrasi Menjadi Sekadar Prosedural, Bukan Substantif

Jika politik uang terus dibiarkan, pemilu hanya menjadi acara rutin tanpa makna: rakyat memilih berdasarkan imbalan materi, dan bukan berdasarkan program, integritas, atau kompetensi kandidat. Ini menyebabkan demokrasi tidak menghasilkan perwakilan yang mencerminkan kehendak rakyat (*unrepresentative democracy*).

2. Terpilihnya Politisi Berbasis Modal, Bukan Kapasitas

- memprioritaskan kandidat kaya atau didukung pemodal kuat,
- menyingkirkan kandidat berintegritas yang tidak punya dana besar.

Struktur kekuasaan akhirnya dikuasai oleh elite berduit (oligarki), bukan oleh pemimpin yang kompeten dan visioner.

3. Rendahnya Kualitas Kebijakan Publik

Politisi yang menang karena membeli suara cenderung tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat, dan tetapi kepada para sponsor atau jaringan patronase. Tetapi mereka cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, bukan kebijakan pembangunan jangka panjang. Yang mengakibatkan: kualitas tata kelola pemerintahan menurun secara sistematis.

4. Meningkatnya Apatisme Politik Masyarakat, Terutama Pemuda

Jika masyarakat melihat bahwa politik selalu dapat dibeli, maka dalam jangka panjang:

- mereka kehilangan kepercayaan pada pemilu,
- menganggap suara mereka tidak berarti,
- dan enggan berpartisipasi.

Ini mengakibatkan partisipasi politik semakin rendah, merusak basis demokrasi.

5. Runtuhnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum

Ketika pelaku politik uang tidak diproses secara serius maka masyarakat melihat bahwa hukum tidak adil, penegakan hukum bisa dinegosiasi, dan aparat bekerja secara tidak independen. Dalam jangka panjang, kepercayaan masyarakat terhadap polisi, kejaksaan, Bawaslu, dan lembaga negara menurun drastis.

3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?

JAWAB :

Kasus rendahnya partisipasi politik pemuda dan maraknya politik uang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi persoalan struktural dan kultural yang tidak dapat diselesaikan hanya dari satu bidang ilmu. Ketiga perspektif politik, hukum, dan kewarganegaraan sebenarnya menggambarkan bahwa masalah ini bersifat multidimensional, sehingga solusinya pun membutuhkan pendekatan lintas disiplin yang saling memperkuat.

1. Dari Perspektif Politik

Kasus ini menegaskan bahwa sistem politik lokal belum berhasil menciptakan kompetisi politik yang sehat, partai politik yang berfungsi mendidik kader dan pemilih, kampanye yang berbasis isu dan gagasan, proses rekrutmen yang selektif dan meritokratis. Maraknya politik uang dan rendahnya minat pemuda menunjukkan bahwa demokrasi elektoral berjalan secara mekanis, bukan substantif, sehingga

kualitas representasi publik menurun. Jika dibiarkan, hal ini akan melahirkan elite politik yang tidak kompeten, berbasis modal, dan tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.

2. Dari Perspektif Hukum

Perspektif hukum memperlihatkan bahwa penegakan aturan mengenai pelanggaran pemilu masih lemah, baik dari sisi:

- 1) regulasi yang sulit diterapkan,
- 2) kapasitas lembaga pengawas (Bawaslu, Gakkumdu),
- 3) keberanian aparat dalam menindak pelaku,
- 4) maupun budaya masyarakat yang belum mendukung penegakan hukum.

Ketidakmampuan penegak hukum dalam memproses politik uang menciptakan kondisi impunitas, yaitu situasi ketika pelaku tidak dihukum meskipun terbukti melanggar. Impunitas ini berbahaya karena akan memperkuat siklus politik uang, melemahkan otoritas negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang lemah berkontribusi langsung pada tergerusnya kualitas demokrasi.

3. Dari Perspektif Kewarganegaraan

Perspektif kewarganegaraan menyoroti bahwa sekolah sebagai arena pendidikan politik tidak menjalankan perannya secara optimal. Pembelajaran IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan yang masih bersifat hafalan:

- 1) tidak memberikan kemampuan analitis kepada siswa,
- 2) tidak memberi pemahaman mengenai praktik demokrasi dan hukum,
- 3) tidak membangun keberanian moral untuk menolak politik uang,
- 4) tidak menghubungkan teori dengan realitas lokal.

Akibatnya, generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang tidak kritis, tidak sadar politik, dan cenderung apatis, sehingga tingkat partisipasi pemilih muda menjadi sangat rendah. Ini merupakan tanda bahwa pendidikan kewarganegaraan belum

sukses membentuk civic virtue (nilai-nilai kewargaan) yang diperlukan dalam demokrasi modern.

Pentingnya Sinergi Tiga Disiplin untuk Solusi yang Komprehensif

Untuk menyelesaikan masalah politik uang dan rendahnya partisipasi politik pemuda, ketiga disiplin ini harus bersinergi, karena masing-masing memiliki peran yang tidak dapat digantikan oleh yang lain.

a. Politik memberikan kerangka sistem dan kelembagaan yang sehat

Melalui reformasi partai politik, kampanye berbasis program, dan sistem rekrutmen yang transparan.

b. Hukum memastikan bahwa semua aturan ditegakkan secara konsisten dan adil

Melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu, penguatan Bawaslu, dan sanksi tegas terhadap pelanggar.

c. Kewarganegaraan membentuk warga negara yang kritis, sadar hukum, dan anti politik uang

Melalui pendidikan demokrasi yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada praktik. Sinergi ketiganya menghasilkan ekosistem demokrasi yang sehat, yaitu ketika:

- 1) sistem politik bersih dan transparan,
- 2) hukum tegak dan dipercaya,
- 3) warga cerdas dan bertanggung jawab.

Jika salah satu elemen melemah, keseluruhan sistem demokrasi ikut rapuh. Politik tanpa hukum menciptakan kekuasaan yang sewenang-wenang; hukum tanpa warga yang kritis akan mandul; pendidikan tanpa dukungan sistem politik akan tidak relevan.

- 4. Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strateginya!**

JAWAB :

PROGRAM: SEKOLAH DEMOKRASI & LITERASI HUKUM

Tujuan Utama

- 1) Membentuk siswa yang melek politik dan hukum.
- 2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu demokrasi, pemilu, korupsi, dan hak-hak warga negara.
- 3) Mendorong budaya partisipasi dan kepedulian terhadap kehidupan bernegara.

Komponen	Deskripsi Program
Tujuan Program	• Meningkatkan literasi politik dan hukum siswa. • Membentuk warga negara muda yang kritis, aktif, dan anti politik uang. • Menumbuhkan budaya demokrasi di lingkungan sekolah.
Unsur Kurikulum	1. Integrasi Materi: demokrasi, pemilu, politik uang, hak & kewajiban warga negara, sistem hukum, lembaga negara, literasi digital politik. 2. PjBL (Projek Berbasis Masalah): kampanye anti money politics, simulasi pemilu sekolah, sidang mini (mock trial). 3. Kolaborasi eksternal: KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, LSM antikorupsi, media lokal.
Metode Pembelajaran	1. Contextual Teaching Learning: analisis kasus politik uang, partisipasi pemilih muda, berita aktual. 2. Debate & Deliberative Democracy: debat kandidat, forum warga sekolah, musrenbang mini. 3. Inquiry Learning: investigasi peran Bawaslu/KPU, wawancara warga, riset kasus hukum. 4. Experiential Learning: kunjungan ke DPRD, pengadilan, KPU; praktik simulasi kampanye. 5. Media Digital: podcast politik siswa, video edukasi, infografis hukum, simulasi game parlemen.

Komponen	Deskripsi Program
Strategi Evaluasi	1. Evaluasi Autentik: proyek kampanye, infografis hukum, podcast, makalah analisis isu politik. 2. Penilaian Performansi: debat, simulasi pemilu, sidang mini, presentasi advokasi. 3. Rubrik Penilaian: konsep politik-hukum, argumentasi kritis, integritas, kreativitas, kerja tim. 4. Refleksi Individu: jurnal pemilih muda, pandangan tentang politik uang, esai integritas. 5. Portofolio Kewarganegaraan: kumpulan hasil riset, dokumentasi proyek, laporan kunjungan.
Output yang Diharapkan	• Siswa menjadi pemilih rasional dan kritis. • Sekolah berbudaya demokratis dan anti korupsi. • Meningkatnya partisipasi politik siswa. • Terjalinnnya kerja sama sekolah–KPU–Bawaslu–LSM.